

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Laporan Keuangan Desa Di Desa Tegide'u Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat

Penulis:

Enzelina Zai¹
Serniati Zebua²
Noviza Asni Waruwu³
Dedi Irawan Zebua⁴

Afiliasi:

Universitas Nias

Korespondensi:

enjelzai20@gmail.com¹
sernizebua97@gmail.com²
noivnoiv@gmail.com³
dedizebua8@gmail.com⁴

Histori Naskah:

Submit: 03-10-2024
Accepted: 25-10-2024
Published: 01-11-2024

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintahan pada laporan keuangan desa di desa tegide'u kecamatan sirombu kabupaten nias barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* diperoleh 12 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan desa telah mencatat pendapatan dan belanja operasional sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam beberapa aspek, khususnya dalam pengakuan dan pengukuran aset tetap serta pelaporan kewajiban. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kemajuan dalam penerapan SAP, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Ketidaksesuaian ini menunjukkan perlunya perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut dalam praktik akuntansi desa untuk meningkatkan akurasi dan kepatuhan standar yang berlaku.

Kata kunci: Laporan Keuangan Desa, Standar Akuntansi Pemerintahan

Pendahuluan

Menurut Ensiklopedia Indonesia, desa adalah suatu kesatuan yang dihuni oleh beberapa keluarga dengan sistem pemerintahannya masing-masing (dipimpin oleh seorang kepala desa) atau kumpulan rumah-rumah yang membentuk satu kesatuan di luar kota. Dengan menyusun laporan keuangan secara berkala, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, maka desa dianggap sebagai badan hukum yang memerlukan pencatatan keuangan tersendiri dari individu dan kelompok lain dalam masyarakat. Laporan-laporan ini mencerminkan posisi keuangan desa pada akhir tahun. Periode Tertentu Periode mewakili periode dan kinerja keuangan selama periode tertentu.

Desa wajib menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan mereka. Ini termasuk publikasi laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat setempat dan pemeriksaan oleh auditor independen untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan hukum yang berlaku. Bendahara desa mencatat proses transaksi yang terjadi di desa dan dibuktikan dengan catatan. Catatan dan laporan keuangan kemudian dibuat, sehingga menghasilkan informasi berupa laporan keuangan untuk digunakan oleh pemangku kepentingan desa.

Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah :

1. Masyarakat desa; Masyarakat bisa mengetahui bagaimana dan untuk apa dana desa digunakan. Dengan adanya akses terhadap informasi keuangan desa, masyarakat dapat lebih terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan pengembangan dan penggunaan anggaran desa.

2. Perangkat desa; Informasi keuangan tingkat desa membantu aparat desa dalam mengambil keputusan seperti alokasi anggaran dan prioritas pembangunan. Pejabat desa dapat menggunakan informasi keuangan untuk memantau realisasi anggaran dan melaksanakan hasil pembangunan.
3. Pemerintahan daerah; Informasi keuangan desa dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan masyarakat setempat.
4. Pemerintahan pusat; Informasi keuangan desa membantu pemerintah menyesuaikan kebijakan pengambilan keputusan strategis atas alokasi dana pembangunan nasional, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan di pedesaan.

Praktik akuntansi ditingkat desa sering kali beragam dan tidak konsisten karena belum ada standar yang jelas dan berlaku umum. Akuntansi desa yang tidak terstandarisasi dapat menyebabkan ketidaktransparan dalam pengelolaan keuangan desa serta kesulitan akan membandingkan kinerja keuangan antar desa. Kurangnya konsistensi dan transparansi dalam pelaporan keuangan ditingkat desa karena kurangnya pemahaman standar akuntansi yang berlaku, tuntutan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan yang lebih efektif ditingkat desa sesuai dengan standar yang diterapkan oleh pemerintahan serta dampak negatif terhadap kredibilitas dan integritas pemerintahan desa jika tidak mematuhi standar akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan standar akuntansi pemerintahan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan konsistensi dalam pelaporan keuangan desa.

Laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang kinerja keuangan suatu entitas, seperti desa atau perusahaan. Dalam desa laporan keuangan bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur dalam Pasal 32 bahwa format dan isi laporan keuangan pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disampaikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Standar Akuntansi Pemerintahan: Peraturan Nomor 71 Tahun 2012). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah seperangkat prinsip, standar, pedoman, dan prosedur yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan entitas pemerintahan, termasuk desa. Standar akuntansi pemerintahan ini dikembangkan oleh Komisi Independen Standar Akuntansi Pemerintahan, ditinjau terlebih dahulu oleh Dewan Audit, dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintahan mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Desa Tegide'u merupakan sebuah desa di Indonesia yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Nias, tepatnya di Kabupaten Nias Barat. Desa tegide'u terletak di daerah pedesaan dengan populasi berjumlah beberapa ribu penduduk, terdiri dari keluarga-keluarga yang umumnya berprofesi sebagai petani atau pekerja sektor formal lainnya. Komunitasnya memiliki ikatan sosial yang kuat dan mengenal satu sama lain. Sektor ekonomi utama di desa tegide'u didominasi oleh pertanian, sayuran, atau buah-buahan sebagai kegiatan utama, beberapa penduduk juga terlibat dalam peternakan atau kerajinan lokal sebagai sumber penghasilan tambahan. Desa tegide'u ini memiliki fasilitas umum seperti kantor kepala desa atau balai desa, pusat kesehatan masyarakat dan tempat ibadah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa atau lurah yang terpilih secara demokratis, dengan bantuan dari dewan desa dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan dasar kepada penduduk. Masalah yang sering di temui di desa ini adalah keterbatasan sumber daya dan pengetahuan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan observasi awal diketahui bahwa di desa tegide'u kecamatan Sirombu kabupaten Nias Barat terdapat banyak perangkat desa yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam manajemen keuangan atau akuntansi yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam pencatatan, pelaporan dan analisis keuangan yang akurat. Masyarakat desa juga tidak mendapatkan informasi keuangan desa yang memadai karena komunikasi yang kurang efektif antara perangkat desa

dan masyarakat. Penerapan standar akuntansi yang meningkatkan transparansi dan memperkuat akuntabilitas penggunaan dana publik serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik ditingkat desa. Ini berarti penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam laporan keuangan desa sangat penting untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan adalah akurat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah dengan mengangkat judul penelitian tentang “**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Laporan Keuangan Desa di Desa Tegide’u Kec.Sirombu Kab.Nias Barat**”

Tinjauan Pustaka

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah seperangkat prinsip, aturan, dan prosedur yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun secara konsisten, transparan, dan akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (*Standar Akuntansi Pemerintahan: Peraturan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, 2012*). SAP adalah prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Pada tahun 2010, pemerintah mengumumkan peraturan baru tentang standar akuntansi pemerintahan melalui PP No.71 Tahun 2010 yang mengatur penggunaan akuntansi akrual dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah, untuk menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005.

Jenis-Jenis Laporan Keuangan Desa Yang Sesuai SAP

jenis-jenis laporan keuangan desa yang sesuai dengan SAP:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- Menggambarkan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi penerimaan dan pengeluaran selama periode tertentu.
- Menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

- Menunjukkan perubahan saldo anggaran lebih dari awal hingga akhir periode pelaporan.
- Menggambarkan surplus atau defisit anggaran yang terjadi selama periode tersebut.

3. Neraca

- Menyajikan posisi keuangan desa pada tanggal tertentu yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas.
- Memberikan informasi tentang kekayaan dan kewajiban desa serta sisa hasil usaha yang dimiliki.

4. Laporan Operasional (LO)

- Menggambarkan pendapatan dan beban selama periode pelaporan yang tidak terkait langsung dengan anggaran.
- Menunjukkan hasil operasi desa dalam menghasilkan pendapatan dan mengeluarkan beban operasional.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

- Menyajikan informasi mengenai aliran masuk dan keluar kas selama periode tertentu.
- Diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- Berguna untuk menilai kemampuan desa dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kebutuhan likuiditas di masa depan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

- o Menunjukkan perubahan ekuitas desa selama periode pelaporan.
- o Menggambarkan sumber dan penggunaan ekuitas, termasuk surplus atau defisit operasional, koreksi kesalahan, dan perubahan kebijakan akuntansi.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

- o Memberikan penjelasan dan informasi tambahan mengenai angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan lainnya.
- o Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian pos-pos tertentu, serta informasi relevan lainnya yang diperlukan untuk memahami secara lengkap posisi keuangan dan kinerja desa.

Laporan Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 113 Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013, kekayaan keuangan desa meliputi segala hak dan kewajiban desa yang dapat dibayar dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pekerjaan. desa, termasuk hak dan kewajiban desa (sujarweni, 2015). Laporan ini bertujuan menjelang meninggalkan bukti keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta pemerintah. Laporan keuangan desa umumnya disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku, dan harus diaudit oleh pihak yang berwenang untuk memastikan akurasi dan kepatuhannya terhadap regulasi yang ada.

Dalam laporan keuangan desa, unsur-unsur yang dicakup mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Berikut penjelasan rinci mengenai masing-masing unsur tersebut:

1. Aset

Menurut Siregar (2020: 175), aset adalah suatu barang atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, komersial, atau nilai tukar dan dimiliki oleh suatu badan usaha atau orang perseorangan (individu)(Wahyuni & Khoiruzin, 2020).

Aset desa dapat dibagi menjadi beberapa kategori:

- Aset Lancar: Aset yang dapat dengan mudah diubah menjadi kas atau dikonsumsi dalam jangka waktu satu tahun. Contohnya: Kas dan setara kas, Piutang, Persediaan barang.
- Aset Tetap: Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam operasi desa dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Contohnya: Tanah, Bangunan, Peralatan dan mesin, Kendaraan.
- Aset Tak Berwujud: Aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomi. Contohnya: Hak cipta, Hak paten.

2. Kewajiban

Menurut Munawir (2020: 18), seluruh hutang adalah kewajiban keuangan suatu perusahaan kepada pihak lain yang belum dipenuhi, dan hutang tersebut merupakan sumber dana bagi perusahaan atau modal dari kreditur(Maulana & Safa, 2017).

Kewajiban desa dapat dibagi menjadi dua kategori:

- Kewajiban Jangka Pendek:Kewajiban yang harus diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun. Contohnya:Utang usaha, Utang pajak, Beban yang masih harus dibayar.
- Kewajiban Jangka Panjang:Kewajiban yang harus diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Contohnya:Pinjaman jangka panjang.

3. Ekuitas

Menurut PSAK No.21 ayat 2 (IAI: 2020), modal atau ekuitas adalah bagian dari hak milik suatu perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan oleh karena itu merupakan ukuran harga jual perusahaan tersebut(Nisak, 2018). Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih desa dan dapat dibagi menjadi beberapa komponen:

- Modal Awal: Nilai awal dari modal yang dimiliki oleh perusahaan pada saat pembentukan.
- Modal: Penambahan modal yang berasal dari sumbangan atau hibah.
- Surplus/Defisit: Selisih antara pendapatan dan belanja desa dalam satu periode anggaran. Surplus menunjukkan kelebihan pendapatan atas belanja, sementara defisit menunjukkan sebaliknya.
- Ekuitas Akhir: Total ekuitas perusahaan pada akhir periode pelaporan, yang merupakan penjumlahan dari modal awal, tambahan modal, dan surplus/defisit.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan standar akuntansi pemerintahan dalam penyajian laporan keuangan di tingkat desa. Data yang di peroleh melalui Observasi langsung dan wawancara terhadap orang-orang terkait. Wawancara ini melibatkan orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaporan keuangan, seperti sekretaris dan bendahara.

Hasil

berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peran akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa dijadikan sebagai alat ukur mewujudkan akuntabilitas dan transparansi desa dimana salah satu peran akuntansi desa adalah menyediakan Informasi keuangan berbagai desa yang lengkap dan akurat untuk memudahkan pembukuan.

Di Desa Tegide'u, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada laporan keuangan desa dilakukan dengan mengikuti pedoman akuntansi yang ditetapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pertama-tama, pemerintah desa dan staf keuangan di Desa Tegide'u mendapatkan pelatihan tentang SAP untuk memahami prinsip-prinsip dasar akuntansi yang berlaku. Menurut **Sukirno** dalam bukunya "*Akuntansi Sektor Publik*" (2014), pelatihan adalah elemen kunci dalam implementasi SAP. **Sukirno** menekankan bahwa pelatihan yang efektif membantu staf pemerintah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan secara tepat.

Dalam proses perencanaan anggaran, desa menyusun anggaran dengan rinci, memastikan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Semua dokumen anggaran disimpan dengan baik untuk referensi dan pertanggungjawaban. Transaksi keuangan, baik pendapatan maupun belanja, dicatat secara akurat sesuai prinsip SAP pada saat terjadinya transaksi. Laporan keuangan desa mencakup laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus kas, dan laporan operasional. Audit internal dan eksternal dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap SAP dan mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian. Laporan keuangan desa dipublikasikan secara terbuka untuk masyarakat, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa juga memberikan penjelasan mengenai laporan keuangan dan pencapaian program.

Pembahasan

“Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Laporan Keuangan Desa di Desa Tegide'u Kec.Sirombu Kab.Nias Barat ?”

berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peran akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa dijadikan sebagai alat ukur mewujudkan akuntabilitas dan transparansi desa dimana salah satu peran akuntansi desa adalah menyediakan Informasi keuangan berbagai desa yang lengkap dan akurat untuk memudahkan pembukuan.

Di Desa Tegide'u, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada laporan keuangan desa dilakukan dengan mengikuti pedoman akuntansi yang ditetapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pertama-tama, pemerintah desa dan staf keuangan di Desa Tegide'u mendapatkan pelatihan tentang SAP untuk memahami prinsip-prinsip dasar

akuntansi yang berlaku. Menurut Sukirno dalam bukunya "*Akuntansi Sektor Publik*" (2014), pelatihan adalah elemen kunci dalam implementasi SAP. Sukirno menekankan bahwa pelatihan yang efektif membantu staf pemerintah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan secara tepat.

Dalam proses perencanaan anggaran, desa menyusun anggaran dengan rinci, memastikan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Semua dokumen anggaran disimpan dengan baik untuk referensi dan pertanggungjawaban. Transaksi keuangan, baik pendapatan maupun belanja, dicatat secara akurat sesuai prinsip SAP pada saat terjadinya transaksi. Laporan keuangan desa mencakup laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus kas, dan laporan operasional. Audit internal dan eksternal dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap SAP dan mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian. Laporan keuangan desa dipublikasikan secara terbuka untuk masyarakat, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa juga memberikan penjelasan mengenai laporan keuangan dan pencapaian program.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada laporan keuangan desa bertujuan untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan akurat, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Penyusunan anggaran desa harus dilakukan sesuai dengan prinsip SAP, melibatkan perencanaan yang rinci mengenai alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan. Semua dokumen terkait anggaran harus disimpan sebagai bukti. Pengakuan dan pencatatan transaksi keuangan juga harus mematuhi prinsip SAP, termasuk pengakuan pendapatan dan belanja pada saat terjadinya transaksi, serta pencatatan yang akurat dalam buku pembantu dan buku besar.

J. B. Sayid dalam "*Public Sector Accounting: A Practical Guide*" (2016) menjelaskan pentingnya penyusunan anggaran yang sesuai dengan standar akuntansi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Dokumen-dokumen anggaran, termasuk rencana anggaran tahunan dan keputusan musyawarah desa, menunjukkan bagaimana dana dialokasikan sesuai dengan pedoman SAP. Penyusunan laporan keuangan Desa mencakup beberapa jenis laporan penting: Laporan Realisasi Anggaran, yang membandingkan anggaran yang direncanakan dengan realisasi pengeluaran dan pendapatan; Laporan Neraca, yang menunjukkan posisi keuangan desa pada akhir periode; Laporan Arus Kas, yang mengilustrasikan aliran kas masuk dan keluar; dan Laporan Operasional, yang menggambarkan hasil dari kegiatan operasional desa.

Di Desa Tegide'u Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan belum di terapkan secara maksimal di karenakan penyajian laporan keuangan yang di buat oleh Desa Tegide'u hanya sebatas laporan realisasi anggaran penggunaan dana desa saja, dimana masih ada beberapa jenis laporan keuangan yang belum di buat oleh pihak Desa yang sesuai dengan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010, hal itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jenis Laporan Keuangan

No	Jenis Laporan Keuangan	Ada	Tidak
1	Laporan Realiasi Anggaran	✓	-
2	Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih	-	✓
3	Neraca	✓	-
4	Laporan Operasional	✓	-
5	Laporan Arus kas	✓	-
6	Laporan Perubahan Ekuitas	-	✓
7	Catatan Atas Laporan Keuangan	-	✓

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di Desa Tegide'u Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan belum di terapkan secara maksimal di karenakan jenis laporan keuangan yang ada di desa Tegide'u hanyalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Dan Laporan Operasional saja, sementara untuk Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan, tidak ada di Desa Tegide'u.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi yang terjadi selama periode laporan. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana anggaran yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dan bagaimana alokasi anggaran digunakan.

Komponen Utama:

- **Pendapatan:** Semua sumber penerimaan desa, seperti dana transfer dari pemerintah pusat, pajak daerah, sumbangan, dan lainnya. Laporan ini menunjukkan anggaran yang diperkirakan dan realisasi pendapatan yang diperoleh.
- **Belanja:** Pengeluaran desa, termasuk belanja operasional dan belanja modal. Belanja operasional meliputi pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari, sedangkan belanja modal meliputi pengeluaran untuk investasi seperti pembangunan infrastruktur.
- **Selisih:** Selisih antara anggaran dan realisasi memberikan gambaran apakah pengeluaran dan penerimaan sesuai dengan rencana atau tidak. Selisih positif menunjukkan anggaran belanja tidak terpakai sepenuhnya, sedangkan selisih negatif menunjukkan belanja melebihi anggaran.

Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih	Presentase realisasi %
Pendapatan				
Dana Desa (DD)	Rp 700.000.000	Rp 698.273.000	-Rp 1.727.000	99,7 %
Alokasi Dana Desa	Rp 350.000.000	Rp 335.150.000	-Rp 14.850.000	95,7 %
Hasil pajak & Retribusi	Rp 8.500.000	Rp 8.125.000	-Rp 375.000	95,5 %
Sumber Lainnya	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 0	100 %
Total Pendapatan	Rp 1.058.600.000	Rp 1.041.648.000	-Rp 16.952.000	98,5 %
Belanja				
Penyelenggaraan pemerintah	Rp 410.000.000	Rp 405.370.452	-Rp 4.629.548	98,8 %
Pelaksanaan pembangunan	Rp 230.000.000	Rp 217.861.764	-Rp 12.138.236	94,7 %
Pembinaan masyarakat	Rp 25.000.000	Rp 22.645.400	-Rp 2.354.600	90,6 %
Pemberdayaan masyarakat desa	Rp 170.000.000	Rp 164.405.000	-Rp 5.595.000	99,7 %
Penanggulangan bencana	Rp 173.000.000	Rp 172.800.000	-Rp 200.000	99,8 %
Total Belanja	Rp 1.008.000.000	Rp 983.082.616	-Rp 24.917.384	97,5 %
Surplus (Defisit)	Rp 50.600.000	Rp 58.565.384	Rp 7.965.384	-

Sumber : Laporan Keuangan Desa Tegide'u

Dari data Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada periode tersebut relatif baik, dengan beberapa pencapaian yang memuaskan dan beberapa area yang

mebutuhkan perhatian. Total pendapatan desa mencapai Rp 1.041.648.000, yang mencerminkan 98,5% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.058.600.000. Meskipun sebagian besar pos pendapatan hampir sesuai dengan anggaran, terdapat kekurangan pada Alokasi Dana Desa dan Hasil Pajak & Retribusi, masing-masing mencapai 95,7% dan 95,5% dari target anggaran. Kekurangan ini, terutama dalam Hasil Pajak & Retribusi, menunjukkan potensi untuk memperbaiki strategi pemungutan pajak atau meningkatkan upaya untuk mendapatkan lebih banyak sumbangan dan hibah.

Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp 983.082.616, yang merupakan 97,5% dari anggaran belanja sebesar Rp 1.008.000.000. Belanja untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana terealisasi hampir sepenuhnya, masing-masing 99,7% dan 99,8%, menandakan pengelolaan anggaran yang efisien dalam area tersebut. Namun, terdapat kekurangan yang signifikan dalam belanja Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan, dengan realisasi masing-masing sebesar 94,7% dan 90,6%. Kekurangan ini mungkin menunjukkan bahwa beberapa proyek pembangunan dan program pembinaan masyarakat mengalami penundaan atau tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai rencana.

Surplus akhir yang tercatat sebesar Rp 58.565.384 menunjukkan bahwa pendapatan melebihi belanja, dengan surplus yang lebih besar dari anggaran surplus yang diperkirakan Rp 50.600.000. Selisih positif sebesar Rp 7.965.384 menunjukkan pengelolaan keuangan yang lebih baik dari yang direncanakan.

2. Laporan Neraca

Laporan Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan desa pada suatu titik waktu tertentu. Ini memberikan gambaran tentang apa yang dimiliki (aset), apa yang harus dibayar (kewajiban), dan nilai bersih (ekuitas) dari desa.

Komponen Utama:

- Aset: Semua kekayaan desa, dibagi menjadi:
 - a. Aset Tetap: Aset yang digunakan dalam jangka panjang, seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Aset ini tidak mudah diubah menjadi kas dalam waktu dekat.
 - b. Aset Lancar: Aset yang dapat diubah menjadi kas dalam waktu singkat, seperti kas, piutang, dan persediaan.
- Kewajiban: Kewajiban atau utang yang harus dibayar oleh desa:
 - a. Kewajiban Jangka Pendek: Utang yang jatuh temponya dalam waktu satu tahun, seperti utang kepada pemasok atau tagihan yang harus dibayar.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang: Utang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun, seperti pinjaman jangka panjang.
- Ekuitas: Nilai bersih yang tersisa setelah dikurangi kewajiban dari aset. Ini mencerminkan kekayaan bersih desa yang dapat digunakan untuk kegiatan masa depan.

Tabel 3. Laporan Neraca

Aset	Jumlah	Kewajiban	Jumlah
Aset Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
- Kas	Rp 50.000.000	- Utang Usaha	Rp 20.000.000
- Piutang	Rp 10.000.000	- Utang Lainnya	Rp 5.000.000
Total Aset Lancar	Rp 60.000.000	Total Kewajiban Jangka Pendek	Rp 25.000.000
Aset Tetap		Kewajiban Jangka Panjang	
-Tanah dan Bangunan	Rp 200.000.000	- Utang Jangka Panjang	Rp 40.000.000
- Peralatan	Rp 30.000.000	Total Kewajiban Jangka Panjang	Rp 40.000.000
Total Aset Tetap	Rp 230.000.000	Ekuitas	Jumlah
Total Aset	Rp 290.000.000	- Modal Desa	Rp 225.000.000
		- Saldo Laba Ditahan	Rp 35.000.000
		Total Ekuitas	Rp 260.000.000
		Total Kewajiban dan Ekuitas	Rp 290.000.000

Sumber : Laporan Keuangan Desa Tegide'u

Laporan Neraca memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan desa pada suatu titik waktu tertentu dengan membagi aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset mencakup semua kekayaan yang dimiliki desa dan dibagi menjadi dua kategori utama: aset tetap dan aset lancar. Aset tetap, seperti tanah, bangunan, dan peralatan, adalah kekayaan yang digunakan dalam jangka panjang dan tidak mudah diubah menjadi kas dalam waktu singkat. Di sisi lain, aset lancar mencakup kas, piutang, dan persediaan yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi kas untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Kewajiban mencerminkan utang yang harus dibayar oleh desa, yang juga terbagi menjadi dua kategori. Kewajiban jangka pendek mencakup utang yang harus dilunasi dalam waktu satu tahun, seperti utang kepada pemasok dan tagihan yang harus dibayar. Sedangkan kewajiban jangka panjang meliputi utang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun, seperti pinjaman jangka panjang yang memerlukan perencanaan pembayaran lebih lanjut. Ekuitas menunjukkan nilai bersih desa, yaitu selisih antara total aset dan total kewajiban. Ini mencerminkan kekayaan bersih yang dapat digunakan untuk kegiatan masa depan dan investasi. Ekuitas yang positif menunjukkan bahwa desa memiliki lebih banyak aset dibandingkan dengan kewajiban, mencerminkan kesehatan finansial yang baik. Sebaliknya, ekuitas negatif menunjukkan bahwa kewajiban melebihi aset, yang bisa menandakan masalah finansial yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Analisis Laporan Neraca membantu dalam mengevaluasi stabilitas keuangan desa dan memberikan dasar untuk perencanaan keuangan jangka panjang serta pengambilan keputusan yang strategis.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menunjukkan aliran kas masuk dan keluar dari desa selama periode tertentu. Ini penting untuk memahami seberapa baik desa mengelola kasnya dan bagaimana kas digunakan dalam kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan.

Komponen Utama:

- Arus Kas dari Aktivitas Operasi: Menunjukkan kas yang diterima dan dikeluarkan dari aktivitas operasional sehari-hari, seperti penerimaan dari pajak dan pengeluaran untuk gaji.
- Arus Kas dari Aktivitas Investasi: Menunjukkan kas yang diterima atau dikeluarkan dari transaksi yang melibatkan aset tetap, seperti pembelian atau penjualan aset.
- Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan: Menunjukkan kas yang diperoleh dari atau dibayarkan untuk utang atau pinjaman, seperti penerimaan pinjaman atau pembayaran utang.
- Total Perubahan Kas: Perubahan keseluruhan dalam kas selama periode laporan, mengindikasikan apakah kas desa meningkat atau menurun.

Tabel 4. Laporan Arus Kas

Uraian	Jumlah
Arus Kas dari Kegiatan Operasi	
- Penerimaan Kas	Rp 155.000.000
- Pengeluaran Kas	Rp 145.000.000
Kas Bersih dari Kegiatan Operasi	Rp 10.000.000
Arus Kas dari Kegiatan Investasi	Rp -30.000.000
Kas Bersih dari Kegiatan Investasi	Rp -30.000.000
Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan	
- Penerimaan Pinjaman	Rp 40.000.000
- Pelunasan Utang	Rp -20.000.000
Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan	Rp 20.000.000
Perubahan Kas Bersih	Rp 0
Saldo Kas Awal	Rp 50.000.000
Saldo Kas Akhir	Rp 50.000.000

Sumber : Laporan Keuangan Desa Tegide'u

Analisis arus kas desa menunjukkan bahwa selama periode tertentu, desa berhasil mempertahankan keseimbangan kas dengan hasil yang positif dalam beberapa aspek pengelolaan keuangan. Dari kegiatan operasional, desa menghasilkan kas bersih sebesar Rp 10.000.000, menandakan bahwa pendapatan dari kegiatan operasional melebihi pengeluaran kas yang diperlukan untuk menjalankan operasi sehari-hari. Namun, dalam kegiatan investasi, desa mengalami arus kas bersih negatif sebesar Rp -30.000.000, yang menunjukkan bahwa pengeluaran untuk investasi melebihi kas yang diperoleh dari sumber investasi, mencerminkan upaya desa untuk memperluas kapasitas atau meningkatkan infrastruktur dengan dampak langsung pada saldo kas.

Dalam hal pendanaan, desa berhasil memperoleh kas bersih sebesar Rp 20.000.000, berkat penerimaan pinjaman yang lebih besar dibandingkan dengan pelunasan utang. Ini menunjukkan bahwa desa menambah utang baru untuk mendukung kegiatan atau investasi, sementara juga melunasi sebagian utang lama. Meski demikian, saldo kas akhir tetap sama dengan saldo kas awal sebesar Rp 50.000.000, menunjukkan bahwa perubahan kas bersih selama periode tersebut adalah nol. Ini mencerminkan kemampuan desa untuk menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran kas secara keseluruhan. Secara keseluruhan, meskipun terdapat pengeluaran untuk investasi, desa menunjukkan manajemen kas yang efektif, berhasil menjaga stabilitas keuangan dengan saldo kas akhir yang tidak berubah.

4. Laporan Operasional Desa

Laporan Operasional Desa (kadang disebut Laporan Realisasi Kinerja Operasional) menguraikan kegiatan operasional desa dan bagaimana anggaran dialokasikan dan digunakan untuk mencapai tujuan desa. Ini memberi gambaran tentang efektivitas pelaksanaan program dan proyek desa.

Komponen Utama:

- Kegiatan Operasional: Menjelaskan kegiatan utama yang dilakukan desa, seperti program pembangunan infrastruktur, kegiatan sosial, atau pelayanan publik.
- Anggaran Kegiatan: Menunjukkan anggaran yang dialokasikan untuk setiap kegiatan operasional.
- Realisasi Kegiatan: Menunjukkan bagaimana anggaran digunakan untuk masing-masing kegiatan. Ini termasuk pencapaian atau hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut.
- Evaluasi dan Analisis: Menilai seberapa baik kegiatan operasional dilaksanakan dibandingkan dengan rencana. Ini bisa mencakup analisis penyebab perbedaan antara anggaran dan realisasi, serta dampak dari kegiatan operasional terhadap masyarakat.

Tabel 5. Laporan Operasional

Uraian	Jumlah
Pendapatan operasional	
-pendapatan dari pajak	Rp 90.000.000
-pendapatan dari hibah	Rp 50.000.000
Total pendapatan operasional	Rp 140.000.000
Belanja operasional	
-belanja langsung	Rp 120.000.000
-belanja tidak langsung	Rp 25.000.000
Total belanja operasional	Rp 145.000.000
Surplus(defisit) operasional	Rp -5.000.000

Sumber : Laporan Keuangan Desa Tegide'u

Total Pendapatan Operasional desa adalah Rp 140.000.000, yang terdiri dari Rp 90.000.000 dari pajak dan Rp 50.000.000 dari hibah. Pendapatan ini mencerminkan sumber utama kas yang diperoleh desa untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Di sisi lain, Belanja Operasional desa mencapai Rp 145.000.000, dengan rincian Rp 120.000.000 untuk belanja langsung dan Rp 25.000.000 untuk belanja tidak langsung. Total belanja ini menunjukkan total pengeluaran desa untuk berbagai kegiatan operasional, baik yang langsung terkait dengan penyelenggaraan kegiatan maupun pengeluaran

pendukung. Hasil dari perhitungan Surplus (Defisit) Operasional adalah Rp -5.000.000. Angka negatif ini menunjukkan defisit, yang berarti bahwa belanja operasional desa melebihi pendapatan operasionalnya sebesar Rp 5.000.000. Defisit ini mengindikasikan bahwa desa mengalami kekurangan dana dalam membiayai seluruh belanja operasionalnya hanya dengan mengandalkan pendapatan yang ada.

Defisit operasional yang tercatat sebesar Rp 5.000.000 menunjukkan tantangan dalam pengelolaan keuangan desa. Pendapatan yang diterima dari pajak dan hibah tidak cukup untuk menutupi seluruh belanja yang diperlukan. Hal ini mungkin mengindikasikan perlunya evaluasi dalam pengelolaan belanja, kemungkinan perlu adanya pengurangan biaya atau upaya untuk meningkatkan pendapatan melalui sumber lain, seperti pengoptimalan pajak atau peningkatan hibah. Defisit ini juga dapat mempengaruhi keseimbangan kas dan memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan keuangan untuk memastikan keberlanjutan operasional desa dan mencegah potensi masalah keuangan di masa depan.

Perbandingan antara laporan keuangan desa dan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mencerminkan perbedaan mendasar dalam prinsip, format, dan detail laporan. Laporan keuangan desa sering kali mengikuti pedoman lokal yang disesuaikan dengan kapasitas administrasi desa, sehingga formatnya bisa lebih sederhana dan variatif dari satu desa ke desa lainnya. Isi laporan keuangan desa umumnya mencakup laporan realisasi anggaran dan laporan posisi keuangan, tetapi mungkin tidak selengkap atau serinci laporan yang diharuskan oleh SAP. Sementara itu, laporan keuangan menurut SAP mengikuti standar akuntansi yang baku, dengan format dan isi yang lebih konsisten dan komprehensif, termasuk laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan rinci yang menjelaskan elemen-elemen laporan keuangan.

Dalam hal pengakuan dan pengukuran, laporan keuangan desa mungkin tidak selalu mengikuti prinsip akuntansi yang konsisten, sehingga dapat menghasilkan informasi yang kurang rinci tentang pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban. Sebaliknya, SAP mengatur pengakuan dan pengukuran dengan prinsip akuntansi yang jelas dan standar penilaian yang terdefinisi, memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan secara akurat dan konsisten. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi fokus utama dalam SAP, dengan pelaporan yang lebih terbuka dan dapat diakses oleh publik serta pengawasan yang ketat dari badan pemerintah. Implementasi SAP bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan desa, memastikan bahwa semua elemen laporan disajikan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan desa.

Kendala-Kendala yang di Hadapi Pemerintahan Desa dalam Penerapan Standar Akuntansi :

1. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten
Aparatur desa belum memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai untuk menerapkan standar akuntansi dengan benar.
2. Keterbatasan infrastruktur teknologi
Infrastruktur teknologi yang mendukung, seperti perangkat komputer dan akses internet, masih sangat terbatas sehingga menyulitkan desa dalam menjalankan proses akuntansi yang memerlukan teknologi.
3. Minimnya pelatihan dan sosialisasi
Kurangnya pelatihan dan sosialisasi terkait standar akuntansi pemerintahan membuat aparat desa kurang sepenuhnya memahami aturan dan prosedur yang harus diikuti.
4. Keterbatasan anggaran
Anggaran yang terbatas sering kali menjadi kendala dalam implementasi standar akuntansi, terutama untuk kegiatan pelatihan, pengadaan perangkat lunak akuntansi, dan peningkatan sumber daya manusia.

Ketidaksesuaian Dalam Pengakuan Dan Pengukuran Aset Tetap dan pelaporan Kewajiban

1. Pengakuan Aset Tetap:

- **Ketidaksesuaian:** Laporan keuangan desa mungkin tidak selalu mengikuti prinsip pengakuan aset tetap yang konsisten. Beberapa desa mungkin tidak mencatat aset tetap pada saat perolehan atau mungkin tidak mengakui aset tetap yang diperoleh melalui sumbangan atau hibah dengan cara yang sesuai.
- **Seharusnya:** Menurut SAP, aset tetap harus diakui pada saat diperoleh dan dicatat pada nilai perolehan atau nilai wajar. Pengakuan ini mencakup semua biaya yang terkait dengan pengadaan dan pemasangan aset tetap. SAP mengharuskan adanya pencatatan yang tepat untuk memastikan bahwa aset tetap tercermin secara akurat dalam laporan keuangan.

2. Pengukuran Aset Tetap:

- **Ketidaksesuaian:** Pengukuran aset tetap dalam laporan keuangan desa mungkin seringkali tidak dilakukan secara konsisten atau kurang rinci. Misalnya, aset tetap mungkin tidak disusutkan dengan metode yang tepat, atau nilai buku aset mungkin tidak diperbarui untuk mencerminkan depresiasi.
- **Seharusnya:** SAP menetapkan bahwa aset tetap harus diukur pada nilai perolehan awal dan kemudian disusutkan secara sistematis sepanjang umur manfaat aset. Depresiasi harus dihitung menggunakan metode yang sesuai, dan nilai buku aset harus diperbarui untuk mencerminkan depresiasi dan penurunan nilai jika diperlukan.

Ketidaksesuaian dalam Pelaporan Kewajiban

1. Pelaporan Kewajiban:

- **Ketidaksesuaian:** Dalam laporan keuangan desa, pelaporan kewajiban mungkin tidak selalu mencakup semua kewajiban yang ada atau tidak diungkapkan secara rinci. Misalnya, kewajiban jangka panjang seperti pinjaman atau utang mungkin tidak dilaporkan dengan jelas, atau rincian tentang kewajiban kontinjensi mungkin tidak disediakan.
- **Seharusnya:** SAP mengharuskan pelaporan kewajiban dilakukan secara lengkap dan transparan. Kewajiban harus diakui pada saat kewajiban timbul, dan semua kewajiban jangka panjang dan jangka pendek harus dicatat dengan rinci. Laporan keuangan harus mengungkapkan kewajiban kontinjensi dan komitmen yang mungkin mempengaruhi posisi keuangan desa. SAP menekankan pentingnya mengungkapkan informasi yang memadai mengenai kewajiban untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kewajiban yang ada.

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil laporan keuangan desa, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menunjukkan upaya yang signifikan dalam mengikuti pedoman akuntansi yang ditetapkan.
2. Laporan keuangan menunjukkan bahwa pendapatan dan belanja operasional dicatat sesuai dengan standar, namun masih terdapat beberapa ketidaksesuaian, khususnya dalam pengakuan dan pengukuran aset tetap serta pelaporan kewajiban. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kemajuan dalam penerapan SAP, implementasinya belum sepenuhnya optimal.
3. Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan desa mengalami peningkatan, tetapi adanya defisit operasional dan selisih antara anggaran dan realisasi menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Tantangan seperti kurangnya pemahaman mengenai SAP, pelatihan yang terbatas, dan dukungan teknologi yang belum memadai mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Referensi

- Afiah, N. N., Mulyani, S., & Alfian, A. (2020). Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI pada Entitas Akuntansi. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, A. P., & Kustiani, N. A. (2020). Pengantar Akuntansi Pemerintahan. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2020. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1: Penyajian Laporan Keuangan . Jakarta: IAI
- Ikyarti, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131-140.
- Mahartini, N. K. A., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4), 1125-1134.
- Maulana, Z., & Safa, A. F. (2017). Pengaruh hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang terhadap profitabilitas pada PT. Bank Mandiri Tbk. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi)*, 1(1), 44-48.
- Moenek, R., Suwanda, D., & Rachmat, B. (2020). Dasar-dasar Akuntansi Pemerintah Daerah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota semarang. *Jurnal KINERJA* Vol. 20 No. 02.
- Suprihatin, N. S., & Ananthi, A. A. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(2), 242-252.
- Sri Wahyuni, S. E., Dev, M. E., Rifki Khoirudin, S. E., & Dev, M. E. (2020). *Pengantar Manajemen Aset*. Nas Media Pustaka.
- Wahyudi, A., & Hasri, D. A. (2021). Pengaruh Kualitas Perangkat Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 293-298.
- Fitriyani, Y., Zein, M., & Jevry, J. (2023). Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Terhadap Laporan Keuangan Desa Dengan Metode AkruaI Pada Kantor Desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Periode 2017-2019. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 6(1), 1-9.
- Sambodo, B., Filicia, F., Pratama, N., Jaya, S., Maisyarah, S., & Amelia, S. (2023). Pentingnya Laporan Keuangan Pada Umkm. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 4153-4157.